

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Halim *et.at*, 2012). Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, oleh karena itu informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas (Mahmudi, 2010).

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif antara lain: (a) Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik (pemerintah), (b) Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat meningkatnya resiko investasi, (c) Pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya, (d) Kualitas keputusan menjadi buruk, dan (e) Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual (Mardiasmo, 2009).

Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, hal tersebut dilakukan agar informasi dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat. Untuk mengetahui

apakah laporan keuangan yang telah disusun pemda sudah wajar atau belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, tentunya diperlukan pihak ketiga yang independen untuk melakukan pemeriksaan.

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi. Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Sedangkan *good governance* menurut World Bank didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Sedarmayanti, 2009).

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional pemerintah daerah, hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja untuk dapat dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran.

Femomena yang terjadi di Kota Bandar Lampung adalah adanya tuntutan puluhan massa mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bongkar Korupsi saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD setempat, Selasa 5 September 2017. Dalam aksi tersebut massa menuntut pengusutan terhadap penyalahgunaan anggaran bansos Pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar 60

miliar yang tidak terungkap oleh auditor inspektorat Kota Bandar Lampung (www.harianpilar.com diakses 21Desember 2017). Temuan tersebut menunjukkan fenomena bahwa fungsi audit internal oleh inspektorat Pemerintah Kota Bandar Lampung masih perlu pembenahan.

Fenomena selanjutnya berkenaan dengan efektivitas fungsi audit inspektorat adalah, temuan BPK yang dapat dilihat pada tabel rekapitulasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan PDTT (pemeriksaan dengan tujuan tertentu) atas pengelolaan belanja pada pemerintah daerah Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Belanja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung (Nilai dalam Rp. Juta)

| | | | |
|---|--------------|--------|----------|
| Total Ketidakpatuhan | Permasalahan | Jumlah | 7 |
| | | Nilai | 3.426,17 |
| Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang | Permasalahan | Jumlah | 1 |
| | | Nilai | 1.649,47 |
| Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan | Permasalahan | Jumlah | 2 |
| | | Nilai | 1.602,26 |
| Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan | Permasalahan | Jumlah | 4 |
| | | Nilai | 174,44 |

Sumber: BPK, IHP Semester II Tahun 2016

Tabel di atas menunjukkan temuan atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan Belanja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung antara lain; kekurangan volume pekerjaan/atau barang terdapat 1 kasus dengan nilai Rp. 1.649.470.000, kemudian kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan terdapat 2 kasus dengan nilai Rp. 1.602.260.000, lalu lain-lain permasalahan ketidakpatuhan terdapat 4 kasus dengan nilai Rp.174.440.000.

Temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan PDTT (pemeriksaan dengan tujuan tertentu) atas pengelolaan belanja

pada pemerintah daerah Kota Bandar Lampung menunjukkan masih kurang efektifnya audit internal yang dilakukan inspektorat pemerintah Kota Bandar Lampung.

Menurut Mardiasmo (2009), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Dinyatakan dalam pasal 5 standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN), maka aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Menurut Falah (2005), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi.

Menurut Boynton (dalam Rohman, 2007), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam

rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, Inspektorat Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Tugas pokok tersebut adalah untuk: pertama, merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan; kedua, menyusun rencana dan program di bidang pengawasan; ketiga, melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan; dan keempat, melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat kota mempunyai kewenangan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus; kedua, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja; ketiga, pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat kota; dan keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas Inspektorat Kota.

Kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat kota saatini masih menjadi sorotan, karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh

aparatus inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada dua hal yang menyebabkan kompetensi aparatus inspektorat kota kurang optimal. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan yang masih kurang. Selain itu, adanya mutasi antar satuan kerja menyebabkan aparatus yang berpengalaman tergantikan oleh yang tak berpengalaman.

Sebagaimana auditor internal pada umumnya, aparatus inspektorat termasuk di Kota Bandar Lampung berada di bawah pengaruh pihak penentu kebijakan. Di samping itu, dekatnya hubungan interpersonal, baik hubungan kekerabatan atau relasi kepentingan lainnya. Hal ini juga mempengaruhi independensi aparatus inspektorat kota.

Beberapa penelitian berkenaan dengan efektivitas fungsi audit internal: faktor yang mempengaruhi, dan implikasinya terhadap kualitas pelaporan keuangan antara lain; Penelitian Efendy (2010) menyatakan kompetensi, independensi, dan motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit aparatus Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah Pemerintah Kota Gorontalo. Penelitian Ashari (2011) menyatakan keahlian, independensi dan etika secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara, secara parsial keahlian dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor, namun tidak untuk etika. Kemudian hasil penelitian Amril (2013) menyatakan bahwa Efektivitas dan efisiensi penetapan fungsi internal audit pada pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman berjalan dengan sangat efektif dan efisien. Selanjutnya hasil penelitian Septidiany (2014) menyatakan bahwa kompetensi auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap audit internal dan audit internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian Gamayuni (2016) menyatakan bahwa kompetensi auditor internal dan dukungan manajemen berpengaruh terhadap efektivitas fungsi audit internal, efektivitas fungsi audit internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Gamayuni (2016) yang dilakukan pada Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten di Pulau Jawa, sedangkan penulis menjadikan pegawai Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai objek penelitian, Kemudian berdasarkan penelitian Ashari (2011) penulis menambahkan variable independensi auditor internal sebagai salah satu variable independen yang mempengaruhi efektivitas fungsi audit internal. Penambahan variabel ini dilakukan dengan alasan untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian replikasi. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian, yaitu pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah pegawai pada Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten di Pulau Jawa, sedangkan pada penelitian ini penulis menjadikan pegawai Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan dengan efektivitas fungsi audit internal sebagai variabel pemoderasi (Survei Pada Inspektorat Kota Bandar Lampung)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung?
2. Apakah objektivitas auditor internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung?
3. Apakah dukungan manajemen berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung?
4. Apakah independensi auditor internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung?

5. Apakah kompetensi auditor internal yang dimoderasi efektivitas fungsi audit internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung?
6. Apakah objektivitas auditor internal yang dimoderasi efektivitas fungsi audit internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung?
7. Apakah dukungan manajemen yang dimoderasi efektivitas fungsi audit internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung?
8. Apakah independensi auditor internal yang dimoderasi efektivitas fungsi audit internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung?

1.3.Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah menguji secara empiris kompetensi auditor internal, objektivitas audit internal, dan dukungan manajemen berpengaruh kualitas pelaporan keuangan, serta efektivitas memoderasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

1.4.Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Membuktikan secara empiris apakah kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Membuktikan secara empiris apakah objektivitas auditor internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

3. Membuktikan secara empiris apakah dukungan manajemen berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
4. Membuktikan secara empiris apakah independensi auditor internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Membuktikan secara empiris apakah kompetensi auditor internal yang dimoderasi efektivitas fungsi audit internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Membuktikan secara empiris apakah objektivitas auditor yang dimoderasi efektivitas fungsi audit internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
7. Membuktikan secara empiris apakah dukungan manajemen yang dimoderasi efektivitas fungsi audit internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
8. Membuktikan secara empiris apakah independensi auditor internal yang dimoderasi efektivitas fungsi audit internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

1.5. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai efektivitas fungsi audit internal pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis / bagi pemerintah

Sebagai sumbangan pemikiran agar dapat digunakan atau diambil manfaatnya dan dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait efektivitas fungsi audit internal.

3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan pertimbangan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan pengembangan mengenai akuntansi keprilakuan dan akuntansi sektor publik.

1.6.Sistematika Penulisan

Dalam hal ini sistematika penulisan diuraikan dalam 5 bab secara terpisah, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi sumber data, metode pengumpulan data, seperti menjelaskan populasi dan sampel penelitian, fokus penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memdemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya pikir peneliti dalam menganalisis persoalan yang dibahas, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran

merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Teori Sektor Publik

Mahsun et al (2011) mengatakan bahwa sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pendapatan Negara lain yang diakui oleh hukum. Bidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan transportasi adalah contoh sektor public. Oleh karena itu area sektor publik sangat luas.

Sedangkan menurut Bastian (2009) “kata sektor publik dari sisi kebijakan publik dapat dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi berlebihan, pemerintahan yang besar dan nasionalisasi vs privatisasi. Terlihat jelas, dalam arti luas, sektor publik disebut bidang yang membicarakan metode manajemen Negara. Sedangkan dalam arti sempit, diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan pajak.”

Menurut Nordiawan (2009) sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil. Sektor publik juga melakukan transaksi – transaksi ekonomi dan keuangan, tetapi berbeda dengan entitas ekonomi lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, sumber daya ekonomi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba).

Munculnya sektor publik ini tidak terlepas dari sejarah. Awalnya, sektor publik ini muncul karena ada kebutuhan dari masyarakat secara bersama terhadap barang dan layanan tertentu. Untuk menghindari terjadinya alokasi dan distribusi barang atau layanan umum yang tidak adil maka pengaturan pengalokasian dan pendistribusiannya diserahkan kepada pihak (pengurus) tertentu. Warga masyarakat kemudian membayar sejumlah upeti (pajak) untuk mendukung

pengaturan barang atau layanan umum oleh pengurus tersebut (Mahsun et al, 2011).

Sektor publik sendiri telah hadir sejak ribuan tahun sebelum masehi. Bastian (2009) menjelaskan bahwa kemunculan akuntansi sektor publik dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi dalam masyarakat dan kekuatan sosial dalam masyarakat. Bukti sejarah menjelaskan bahwa praktik pencatatan telah dilakukan di zaman Mesir kuno sampai sekarang. Pada awalnya pencatatan ini dilakukan untuk mengadministrasi laporan untuk keperluan pemerintah. Selain itu praktik pencatatan ini juga dilakukan untuk mendukung mekanisme pajak, pembagian pendapatan, inventaris barang dan proses perdagangan antar Negara.

2.2 Laporan Keuangan

Adapun pengertian Laporan keuangan menurut Heri (2012:2) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan”.

Menurut Kasmir (2012:45) Laporan keuangan adalah:

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan entitas pada periode tertentu laporan keuangan juga menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan atau instansi sekarang dan kedepan dengan melihat persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan guna mengambil keputusan ekonomi”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah:

“Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.”